

**LAPORAN PENELITIAN**

**DAMPAK PERUBAHAN PENDUDUK DAN DEMOGRAFI PADA  
PEREKONOMIAN DAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA/ KABUPATEN  
DI SUMATERA BARAT YANG BARU DIMEKARKAN**

**Oleh:**  
**Mahdi, Ph.D.**  
**Yusmarni, MSc.**  
**Yola Malinda, MSi.**  
**Rian Hidayat, SP, MM.**  
**Cindy Paloma, SP, MSi.**  
**Ami Sukma, SP, MSc.**  
**Rafnel Azhari, SP, MSi.**

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Bekerjasama dengan**

**YAYASAN ANGGARI DINAMIKA GLOBAL**



**TAHUN 2014**

## **KATA PENGANTAR**

Pemekaran wilayah pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemekaran daerah diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Dengan adanya Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang, sehingga pembangunan juga akan terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak terlalu tersentuh. Dengan adanya pembangunan akan memicu pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh migrasi yang kemudian akan memberikan dampak positif maupun negatif secara ekonomi dan sosial.

Laporan penelitian ini memberikan gambaran tentang perubahan jumlah dan komposisi penduduk serta dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh pemekaran wilayah di dua kabupaten pemekaran di Sumatera Barat; Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan. Temuan ini diharapkan menjadi informasi dalam menyusun, memperbaiki perencanaan kegiatan dan penganggaran terkait dengan pertumbuhan dan perubahan komposisi penduduk di ibu kota kabupaten pemekaran serta menjadi sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif migrasi terhadap sosial ekonomi di ibu kota kabupaten yang baru dimekarkan tersebut.

Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Yayasan Anggari Dinamika Global dan Tim yang telah melakukan penelitian dan menyelesaikan laporan ini, dengan harapan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penggarapan program Kependudukan dan Keluarga Berencana kedepannya.

Padang, Desember 2014  
Badan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Nasional Perwakilan  
Provinsi Sumatera Barat.

**H. Nofrijal, SP, MA.**  
NIP. 196011111985031001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	2
1.3. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1. Migrasi Penduduk.....	4
2.2. Pola Migrasi .....	7
2.3. Faktor Penarik dan Pendorong Migrasi .....	8
2.4. Teori Perubahan Sosial.....	9
2.5. Teori Konflik .....	14
BAB III. METODE PENELITIAN .....	17
3.1. Lokasi Penelitian.....	17
3.2. Metode .....	17
3.2.1. Kajian Data Sekunder .....	17
3.2.2. Focus Group Discussion .....	18
3.2.3. Wawancara Mendalam (in-depth interview).....	18
3.2.4. Analisa Data.....	18
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	22
4.1. Perkembangan Pembangunan dan Pendudukan Ibu Kota Kabupaten Pemekaran.....	22
4.1.1. Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Solok Selatan .....	22
4.1.2. Perubahan jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang .....	24
4.1.3. Nagari Lingkung Aur Pasaman Barat .....	25
4.1.4. Perubahan jumlah penduduk Nagari Lingkung Aur .....	26
4.2. Dampak ekonomi dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk .....	28
4.2.1. Perubahan ekonomi di Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan.....	28
4.2.2. Perubahan ekonomi di Nagari Lingkung Aur, Pasaman Barat .....	30

4.3. Dampak Sosial dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk.....	31
4.3.1. Dampak Sosial di Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan.....	31
4.3.2. Dampak sosial di Nagari Lingkung Aur, Pasaman Barat .....	32
4.4. Solusi Partisipatif atas permasalahan yang dihadapi .....	34
4.4.1. Solusi Partisipatif dari Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan .....	34
4.4.2. Solusi Partisipatif dari Nagari Lingkung Aur, Pasaman Barat.....	35
4.5. Pembahasan .....	36
 BAB V. KESIMPULAN .....	 38
 BAB VI. RENCANA AKSI YANG DAPAT DILAKUKAN SECEPATNYA .....	 39
6.1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda penduduk asli.....	39
6.2. Penguatan adat untuk menekan dampak negatif secara sosial .....	39
6.3. Pembangunan keluarga .....	40
6.4. Penguatan administrasi kependudukan.....	40
 DAFTAR PUSTAKA.....	 41
 LAMPIRAN .....	 42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Matriks data set Penelitian.....	20
Tabel 2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Gadang dan Lubuk Malako, Solok Selatan .....	24
Tabel 3.	Perkembangan Jumlah Penduduk Nagari Lingkung Aur dan Aur Kuning, Pasaman Barat.....	27

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Semenjak disahkannya UU UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang direvisi menjadi UU NO 32 tahun 2004, pemekaran wilayah di Indonesia semakin gencar. Hal ini mendorong terjadinya imigrasi ke wilayah pemekaran yang kemudian beradampak pada perubahan jumlah dan komposisi penduduk di wilayah tersebut. Dengan adanya pembangunan yang pesat di daerah pemekaran secara langsung membuka banyak lapangan kerja baru yang menarik banyak pendatang berpindah ke daerah pemekaran. Kehadiran para migran ini dipastikan akan memberikan dampak (baik positif maupun negatif) pada ekonomi dan sosial masyarakat, baik bagi pendatang itu sendiri maupun bagi masyarakat setempat. Laporan ini menggambarkan temuan tentang perubahan jumlah dan komposisi penduduk serta dampak ekonomi dan sosial yang terjadi di dua ibu kota kabupaten pemekaran di Sumatera Barat yaitu Nagari Lingkuang Aur (Kabupaten Pasaman Barat) dan Nagari Lubuk Gadang (Kabupaten Solok Selatan).

Berdasarkan data statistik diketahui bahwa setelah dimekarkan pada tahun 2004, Nagari Lingkuang Aur dan Nagari Lubuk Gadang mengalami pembangunan fisik yang pesat seperti adanya pelebaran jalan dan pembangunan perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Hal ini berdampak pada pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah ibu kota kabupaten pemekaran ini yang lebih pesat dibandingkan nagari tetangganya.

Diskusi yang dilakukan dengan wali nagari, pemuka masyarakat, bundo kanduang dan tokoh pemuda di dua wilayah pemekaran diketahui bahwa pemekaran berdampak positif secara ekonomi baik terhadap penduduk asli maupun pendatang. Meskipun tidak ada ketimpangan yang tajam antara tingkat perekonomian pendatang dan penduduk asli, akan tetapi dengan adanya kepemilikan usaha pada daerah-daerah strategis yang lebih didominasi penduduk pendatang dikhawatirkan akan melahirkan kesenjangan dimasa datang.

Hal berbeda terjadi pada aspek sosial. Pemekaran wilayah lebih memberikan dampak negatif pada aspek sosial masyarakat diwilayah pemekaran. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dengan latar belakang yang berbeda, mulai melahirkan konflik-konflik sosial dan masalah-masalah sosial. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa Institusi adat, ternyata belum kuat untuk menghadapi perubahan ekonomi dan sosial masyarakat.

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Faktor demografi berupa kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan migrasi (mobilitas) merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Diantara ketiga faktor demografi di atas, migrasi merupakan satu-satunya faktor non-alami yang dapat berpengaruh terhadap jumlah maupun komposisi penduduk. Migrasi yang merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dapat didorong oleh berbagai alasan dan latar belakang diantaranya: keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tempat baru, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi/ bermutu, faktor keselamatan dan faktor keamanan. Penduduk yang berpindah ke suatu wilayah tidak hanya akan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk tapi juga akan mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut.

Salah satu hal yang dapat mendorong terjadinya migrasi ke suatu wilayah adalah pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah di Indonesia semakin gencar semenjak tahun 1999 sejak di sahkannya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang direvisi menjadi UU NO 32 tahun 2004. Semenjak tahun 1999 sampai sekarang sudah ada lima Kota/ Kabupaten pemekaran di Sumatera Barat, yaitu: 1) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman; 2) Kota Pariaman yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman; 3) Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasaman; 4) Kabupaten Darmastraya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung; dan 5) Kabupaten Solok Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok.

Pemekaran wilayah pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemekaran daerah diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Dengan adanya Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang, sehingga pembangunan juga akan terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak terlalu tersentuh. Semenjak menjadi Kabupaten/ kota baru, kabupaten pemekaran ini mengalami pembangunan fisik yang pesat, terutama di ibukota kabupaten. Selain itu

dengan terbentuknya wilayah pemekaran, berarti pemerintahan administratif baru juga terbentuk yang akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga terbuka pula kesempatan kerja bagi PNS daerah.

Pembangunan yang pesat dan terbukanya lapangan kerja baru ini akan mengundang migrasi masuk ke ibu kota kabupaten pemekaran ini. Konsekwensinya, akan terjadi perubahan jumlah dan komposisi penduduk pada ibu kota-ibu kota kabupaten pemekaran tersebut. Kehadiran para migran ini dipastikan akan memberikan dampak (baik positif maupun negatif) pada ekonomi dan sosial masyarakat, baik bagi pendatang itu sendiri maupun bagi masyarakat setempat. Sehingga diperlukan penelitian untuk memahami apa saja dampak ekonomi dan dampak sosial migrasi masuk pada ibu kota pemekaran, khususnya di Sumatera Barat. Pemahaman ini akan membantu dalam mengambil kebijakan, program dan kegiatan untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perubahan jumlah dan komposisi penduduk di ibu kota kabupaten pemekaran
2. Mengetahui dampak ekonomi perubahan jumlah dan komposisi penduduk tersebut bagi pendatang dan masyarakat asli
3. Mengetahui dampak sosial perubahan jumlah dan komposisi penduduk tersebut ditengah masyarakat
4. Secara partisipatif, mengidentifikasi solusi atas dampak negatif dan meningkatkan dampak positif baik ekonomi dan sosial

## **1.3. Manfaat Penelitian**

Terjawabnya tujuan penelitian diatas akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perencana/penyusun program, menjadi informasi dalam menyusun, memperbaiki perencanaan kegiatan dan penganggaran terkait dengan

pertumbuhan dan perubahan komposisi penduduk di wilayah pemekaran

2. Menjadi sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif migrasi terhadap sosial ekonomi di wilayah pemekaran.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Migrasi Penduduk**

Teori migrasi mula-mula diperkenalkan oleh Ravenstein dalam tahun 1985 dan kemudian digunakan sebagai dasar kajian bagi para peneliti lainnya (Lee, 1966; Zelinsky, 1971 dalam Waridin, 2002). Para peneliti tersebut mengatakan bahwa motif utama atau faktor primer yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi adalah karena alasan ekonomi.

Dalam beberapa studi, pakar mendefinisikan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara atau batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain (Munir, 1981). Sedangkan Mantra (1980) mendefinisikan migrasi adalah tempat tinggal mobilitas penduduk secara geografis yang meliputi semua gerakan (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu pula .

Teori migrasi menurut Ravenstein (1985) mengungkapkan tentang perilaku mobilisasi penduduk (migrasi) yang disebut dengan hukum hukum migrasi berkenaan sampai sekarang. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Para migran cenderung memilih tempat tinggal terdekat dengan daerah tujuan.
2. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.
3. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah pindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting.
4. Informasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi.
5. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut.

6. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut.
7. Para migran cenderung memilih daerah dimana telah terdapat teman atau sanak saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan.
8. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit untuk diperkirakan.
9. Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah.
10. Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah.

Mantra, Kastro dan Keban (1999) dalam Waridin (2002) menyebutkan bahwa ada beberapa teori yang mengungkapkan mengapa seseorang melakukan mobilitas, diantaranya adalah teori kebutuhan dan stres. Setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan yang berupa kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis. Semakin besar kebutuhan yang tidak terpenuhi, semakin besar stres yang dialami seseorang. Apabila stres sudah berada di atas batas toleransi, maka seseorang akan berpindah ke tempat lain yang mempunyai nilai

kefaedahan atau supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Perkembangan teori migrasi ini kemudian dikenal sebagai model "stress treshold" atau model "place utility". Model semacam ini juga diterapkan oleh Keban (1994) dan Susilowati (1998) dalam Ara (2008).

Selain model migrasi tersebut, terdapat model yang dikembangkan oleh Speare (1975). Ia mengatakan bahwa migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti karakteristik sosio – demografis, tingkat kepuasan terhadap tempat tinggal, kondisi geografis daerah asal, dan karakteristik komunitas. Pada umumnya ketidakpuasan pada latar

belakang yang berdimensi struktural ini akan dapat mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi. Sebagai contoh, daerah yang lahan pertaniannya tandus biasanya sebagian besar masyarakatnya akan mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih subur atau banyak peluang ekonomi, khususnya pada sektor non pertanian, misalnya industri, perdagangan dan jasa.

Everett S. Lee (1976) mengungkapkan bahwa volume migrasi di satu wilayah berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah-daerah di dalam wilayah tersebut. Bila melukiskan di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif, negatif dan adapula faktor-faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang memberi nilai yang menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya di daerah tersebut terdapat sekolah, kesempatan kerja, dan iklim yang baik. Sedangkan faktor negatif adalah faktor yang memberi nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat cenderung menimbulkan arus imigrasi penduduk.

Selanjutnya Everett S. Lee (1976) menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi rintangan, misalnya ongkos pindah yang tinggi dan menurutnya terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses migrasi penduduk antara lain :

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
2. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan
3. Rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan
4. Faktor-faktor daerah asal dan daerah tujuan.

Pada masing-masing daerah terdapat faktor-faktor yang menarik seseorang untuk tidak meninggalkan daerah tersebut (faktor positif) dan faktor-faktor yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan seseorang untuk meninggalkan daerah tersebut (faktor negatif). Di samping itu terdapat faktor-faktor yang pada dasarnya tidak ada pengaruhnya terhadap daerah tersebut, faktor ini disebut dengan nol (0). Diantara ke empat faktor

tersebut, faktor individu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk bermigrasi. Penilaian positif atau negatif suatu daerah tergantung pada individu itu sendiri.

Robert Norris (1972) adanya tambahan tiga komponen dari pendapat Lee, yaitu migrasi kembali, kesempatan antara, dan migrasi paksaan (force migration). Norris berpendapat bahwa faktor daerah asal merupakan faktor terpenting. Dapat dikatakan bahwa penduduk migran adalah penduduk yang bersifat bi local population, yaitu dimanapun mereka bertempat tinggal, pasti mengadakan hubungan dengan daerah asal.

Todaro (1969) mengatakan, seseorang akan memutuskan untuk bermigrasi atau tidak tergantung dari present value dari pendapatan yang dapat diperoleh dari migrasi itu positif atau negatif. Dan menurut dia pula bahwa orang tersebut ingin bermigrasi perlu dilihat secara spesifik menurut karakteristik dari calon migran (seperti : pengetahuan dan keterampilan, umur, jenis kelamin, pemilikan modal, dan lain-lain yang relevan) karena tingkat pendapatan dan probabilita akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik tersebut. Todaro mengsumsikan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan sebagai pendorong orang untuk migrasi. Pernyataan ini juga didukung oleh Revenstein (1889) menatakan dalam salah satu hukum migrasinya, bahwa motif ekonomi merupakan pendorong utama seseorang melakukan migrasi.

Pendapat Todaro (1969) bahwa faktor ekonomi merupakan motif yang paling sering dijadikan sebagai alasan utama untuk bermigrasi. Sehingga daerah yang kaya sumber alam tentunya akan lebih mudah menciptakan pertumbuhan ekonominya, meskipun mungkin kurang stabil. Daerah yang kaya sumber daya manusia akan menjadi lokasi yang menarik bagi manufaktur atau jasa, terutama yang menggunakan teknologi tinggi. Seperti lazimnya dalam ilmu ekonomi regional, tenaga kerja akan cenderung melakukan migrasi dari daerah dengan kesempatan kerja kecil dan upah rendah ke daerah dengan kesempatan kerja besar dan upah tinggi.

## **2.2. Pola Migrasi**

Perpindahan individu merupakan analis migrasi dan kecenderungan ini didukung oleh faktor bahwa migrasi biasanya melibatkan orang-orang muda yang belum berkeluarga. Tetapi banyak kasus yang memunculkan bahwa migrasi tidak hanya merupakan suatu perpindahan sekaligus, namun terdapat jenis perpindahan yang berangsurangsur sepanjang waktu atau yang biasa disebut dengan karier migrasi.

Ada tiga migrasi desa ke kota yaitu :

1. Migrasi temporer kaum laki-laki yang terpisah dari keluarga mereka.
2. Migrasi keluarga ke wilayah perkotaan yang diikuti oleh migrasi balik ke kampung halaman.

3. Pembangunan rumah tangga keluarga urban yang permanen. Kuatnya ikatan keanggotaan kepada keluarga besar yang berada di desa dan kepada masyarakat pedesaan, dapat membuat bolak-balik ke desa menjadi proporsi yang menarik.

Tuntutan yang dibuat oleh kaum migran terhadap sistem perkotaan sangat bervariasi sesuai dengan rencana masa depan mereka. Kaum migran yang belum menikah harapannya tidak terlalu banyak. Banyak kaum migran benar-benar menyadari aspirasi mereka untuk pensiun di desa. Mereka yakin sepanjang mereka bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri, suatu hari nanti mereka akan menetap di kampung halaman mereka.

### **2.3. Faktor Penarik dan Pendorong Migrasi**

Rozy Munir dalam Dasar-dasar Demografi (1981), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.

1. Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan penduduk bermigrasi
  - a. Makin berkurangnya sumber-sumber alam
  - b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, karena masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin.
  - c. Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku, di daerah asal
  - d. Tidak cocok lagi dengan adat budaya/kepercayaan di daerah asal
  - e. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karier pribadi
  - f. Bencana alam baik banjir, kebakaran musim kemarau atau adanya wabah penyakit
2. Faktor-faktor penarik yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi
  - a. Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok
  - b. Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
  - c. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
  - d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan
  - e. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung

- f. Adanya aktivitas kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan

Menurut Milan J. Titus (1982) dalam Ara (2008), mengatakan bahwa faktor-faktor daya tarik yang positif orang bermigrasi adalah :

1. Kesempatan kerja yang terdapat dalam sektor
  - a. Sektor pertanian (tidak termasuk pertanian pangan tradisional, meliputi kolonisasi agraris, perkebunan rakyat) contoh Sumatera Utara yaitu mengenai rehabilitasi perkebunan, sedangkan Lampung dan Kalimantan Tengah yaitu Transmigrasi.
  - b. Sektor Ekstraktif : terutama tambang minyak, dan usaha memperoleh kayu. Contoh : Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, dan Selatan yaitu minyak tanah, bauksit, dan kayu.
  - c. Sektor sekunder dan tersier, terutama di kota-kota yang telah bertambah dengan cepat.
2. Tingkat pendapatan regional perkapita
3. Atraksi kota
4. Faktor intuisi-intuisi sosial
5. Keresahan sosial.

Dalam Ara (2008), tumbuhnya berbagai sektor perekonomian di kota-kota besar membuat para responden tertarik untuk dapat menikmati keberhasilan di kota besar dengan cara bekerja dengan harapan mengubah tingkat sosial ekonominya. Hal inilah yang menjadikan penyebab harapan dari keseluruhan responden yang ada, mereka menyatakan bahwa faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi penarik bagi mereka untuk berpindah ke kota.

#### **2.4. Teori Perubahan Sosial**

Para ahli kemasyarakatan telah mengemukakan berbagai teori tentang perubahan sosial, namun karena demikian kompleksnya kehidupan manusia, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tidak mampu hakekat perubahan sosial secara tuntas. Para ahli melihat perubahan sosial dari perspektif yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang teori yang satu bertolak belakang dengan teori yang lain. Penelaahan terhadap teori perubahan sosial meliputi berbagai hal yang penting

diantaranya, proses dan mekanisme perubahan, dimensi perubahan sosial serta kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial.

Perubahan Sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat.

Adaya interaksi sosial akan menimbulkan proses sosial di dalam masyarakat. Tetapi secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mengacu kepada perubahan pola-pola perilaku, termaksud teknologi dan dimensi-dimensi dari ilmu, material dan nonmaterial.

Menurut Ogburn (1932) perubahan sosial meliputi perubahan teknologi yang mengakibatkan perubahan lingkungan material dan mengaturnya, sehingga menimbulkan perubahan atau modifikasi kebiasaan-kebiasan dan lembaga sosial.

Dalam dunia empirik, antara masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Menurut Pujiwati (1986) tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya pula tidak ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Dengan demikian istilah yang lebih lengkap semestinya adalah “perubahan sosial budaya”

Konsep perubahan sosial budaya sebagai fenomena penyelidikan sosiologi dan antropologi sering menimbulkan perdebatan yang spekulatif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perspektif dalam menganalisis perubahan sosial budaya. Secara teoritis perubahan sosial budaya paling tidak dapat dianalisis melalui pendekatan teori fungsionalisme struktural.

Perspektif fungsionalisme struktural dalam sosiologi antropologi pada hakekatnya dilandasi oleh konsepsi-konsepsi yang dikembangkan Emile Durkheim. Menurut Durkheim (dalam Poloma, 1994) masyarakat merupakan keseluruhan organisme yang memiliki realitas sosial. Keseluruhan itu memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagiannya agar ia tetap eksis dalam keadaan normal dan tetap langgeng.

Khusus dalam bidang antropologi, yang dianggap sebagai peletak dasar dari teori fungsionalisme ini yakni Molinowski dan Radcliffe Brown. Kemudian kedua

pendapat tokoh ini dikembangkan dan dimodifikasi oleh seorang muridnya Brown yakni Meyer Fortes. Sementara yang dianggap berjasa dalam teori struktural fungsional modern adalah Talcott Parson.

Perspektif fungsional struktural sebenarnya juga menerangkan masalah perubahan. Karena perspektif ini mewakili salah perspektif utama dalam sosiologi, maka perlu melihat pandangan fungsionalisme struktural terhadap perubahan dalam masyarakat. Van den Berghe (dalam Robert Lauer 1993) melihat ciri-ciri umum dari perspektif ini terhadap perubahan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan, secara sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan;
2. Hubungan sebab dan akibat bersifat “jamak dan timbal balik”
3. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan “keseimbangan dinamis”, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu;
4. Integrasi sempurna tak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi;
5. Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang revolusioner;
6. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi diluar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi dan melalui penemuan-penemuan internal dan
7. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama. Konsep ini memandang perspektif fungsionalisme struktural dalam masyarakat, bahwa perubahan yang muncul dalam kehidupan tidak berjalan cepat, akan tetapi tetap memperhatikan bagaimana keseimbangan antara satu sistem dengan yang lain.

Hoogvelt (1985) mengungkapkan premis pokok teori structural fungsional. Pertama; masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Kedua; keseluruhan atau sistem yang utuh itu menentukan bagian-bagiannya. Artinya bagian yang satu tak dapat dipahami secara terpisah kecuali dapat memperhatikan hubungan dengan sistem keseluruhan yang lebih luas, dimana bagian-bagian itu meliputi nilai kultural, pranata hukum, pola organisasi kekeluargaan, pranata politik, dan organisasi ekonomi teknologi. Ketiga;

bagian-bagian harus dipahami dalam kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan sistem keseluruhan.

Dari perspektif struktural fungsional, memberikan makna bahwa dalam menganalisa perubahan suatu masyarakat tidak cukup hanya dipandang dalam satu sisi saja misalnya hanya dilihat dari segi ekonomi, akan tetapi dalam memaparkan perubahannya, masyarakat dianalisis secara keseluruhan sertadianalisis secara timbal balik, dimana bila ada satu sisi yang berubah dalam kehidupan masyarakat, secara otomatis ada kompoen-komponen lain yang ikut mengalami perubahan. Selanjutnya Himes dan Moore (1968) mengkategorikan perubahan sosial dalam tiga bentuk atau dimensi meliputi; (a) dimensi sturtural, (b); dimensi kutural, dan (c); dimensi internasional. Ketiga dimensi tersebut diberi penjelasan pada masing-masing dimensi seperti: Pertama; dimensi struktural; dimensi perubahan struktural mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial.

Analisis tentang perubahan struktur secara klasik telah diajukan oleh Marx, yaitu menganalisis terjadinya akumulasi modal (capital) sebagai dasar asumsi terjadinya perubahan sosial. Marx (dalam Munandar Sulaimen, 1998) memusatkan perhatiannya pada pada eksploitasi dan alienasi yang inheren dalam setiap pembagian kerja. Alienasi yang inheren dalam setiap pembagian kerja. Alienasi bersumber dari semangat manusia untuk menciptakan lingkungan sendiri.

Marx (dalam Munandar Sulaimen,1998) memberikan kedudukan tertinggi terhadap kenyataan kondisi material di dalam interelasi dialektika dengan kenyataan ide dan hubungan sosial. Proses perkembangan kapitalisme melahirkan perubahan-perubahan sosial yang obyektif di dalam pola antarhubungan dengan kesadaran kelas proletariat yang sedang bertumbuh, menciptakan kesaudaraan aktif yang di perlukan untuk mentransformasikan masyarakat lewat praxis revolusioner. Contohnya aliansi buruh terjadi akibat dari perubahan sosial perkembangan kapitalisme, di mana buruh tidak mempunyai kekuasaan untuk memasarkan produk-produknya. Karena apapun yang ia produksi akan diambil orang lain (pemilik modal) dan tidak akan ada keuntungan yang dihasilkannya. Semua pola hubungan ekonomi adalah pola hubungan, akibatnya keterasingan buruh akan merembet ke

masalah sosial.

Kedua; dimensi kultural; Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat misalnya adanya penemuan (discovery) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil (invention) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan.

Analisis terhadap perubahan sosial dalam dimensi kultural ini telah diajukan Ogburn dengan konsepnya “culture lag”. Menurut Ogburn (1932) kebudayaan dibagi dalam dua kategori yaitu kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Keduanya mendorong terjadinya perubahan dan saling mendahului untuk terjadinya perubahan. Biasanya yang pertama terjadi perubahan adalah pada kebudayaan material, sementara kebudayaan non material lebih lambat jauh dalam proses penyesuaian bentuknya. Keadaan yang demikianlah yang disebut “culture lag”. Dalam hal ini, penemuan teknologi menjadi faktor utama terjadi perubahan sosial. Selanjutnya Ogburn melalui tesis utamanya melihat bahwa berbagai macam kebudayaan moderen tingkat perkembangan dan kecepatannya tidak sama, ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat, perubahan cepat pada suatu kebudayaan menimbulkan kebutuhan penyesuaian melalui perubahan lain, melalui berbagai macam korelasi hubungan setiap kebudayaan.

Analisis perubahan sosial budaya juga telah dilakukan Pitirin Sorokin (dalam, Munandar 1998), mengatakan bahwa jangka panjang pola-pola kebudayaan berubah, proses sejarahnya dan sosial terus menerus mengalami variasi-variasi baru, disertai dengan hal-hal yang sulit diduga dan sulit diramalkan secara keseluruhan, bahkan bersifat unik.

Ketiga; dimensi interaksional. Perubahan sosial menurut dimensi interaksional, mengacu kepada adanya hubungan sosial dalam masyarakat yang diidentifikasi dalam beberapa dimensi. Modifikasi dan perubahan dalam struktur dari pada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Munandar (1998) memandang skema

dari perubahan dalam relasi sosial seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peran undang-undang.

Selanjutnya dalam dimensi interaksional, perubahan sosial kultural dapat dianalisis dari proses interaksi sosial. Misalnya perubahan sosial kultural dipedesaan terjadi karena urbanisasi. Urbanisasi dapat berpengaruh terhadap pergeseran tenaga kerja agraris misalnya ke dalam model pekerjaan sektor informal, maka dengan sendiri akan membuat masyarakat tersebut berubah pula tatanan kehidupannya sebab dalam kehidupan kota misalnya frekuensi interaksi lebih di kedepankan, karena dengan model yang demikian akan membuat masyarakat dapat memahami setiap karakter masing-masing masyarakatnya.

## **2.5. Teori Konflik**

Secara definitif konflik memiliki pengertian yang berbeda-beda, demikian juga para ahli dalam memberikan definisi konflik tidak ada yang sama, karena sudut pandang mereka yang berbeda. Kata konflik berasal dari kata *confligere*, *conflictum* yang berarti saling berbenturan. Arti kata ini menunjuk pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi- interaksi yang antagonis (Kartono, 1998)

Robbin (1984) menyatakan konflik adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mengimbangi usaha-usaha orang lain dengan cara merintang yang menyebabkan frustrasi dalam mencapai tujuan atau meningkatkan keinginannya. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang di dalamnya terdapat kekecokan maksud antara nilai- nilai atau tujuan-tujuan, berpacu menuju tujuan dengan cara yang tidak atau kelihatannya kurang sejalan sehingga yang satu berhasil sementara yang lainnya tidak, juga merupakan konflik (Kolman & Thomas; Barelson & Steiner dalam Said, 1988). Mastenbroek (1987) melihat konflik sebagai ketentuan yang tidak dapat dijalankan, pernyataan ketidakpuasan, proses pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Sementara itu konflik organisasi diartikan sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena

adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi (Handoko, 1997). Sedang mengenai terjadinya konflik, Owens (1991) mengatakan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, hasrat (keinginan), persepsi, nilai, maupun tujuan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut, konflik dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan dari seseorang atau kelompok orang dalam suatu system social yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika mencapai tujuan tertentu (Soetopo & Supriyanto, 2003). Selanjutnya konflik itu pada dasarnya adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Jadi, jika suatu keadaan tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik itu dapat dikatakan tidak ada (Nimran, 1999).

Terdapat beberapa pandangan mengenai konflik, dari sudut pandang tradisional menyatakan bahwa konflik itu berbahaya dan harus dihindari, karena itu menunjukkan adanya kerusakan fungsi dalam kelompok. Konflik dilihat sebagai hasil yang disfungsi sebagai akibat dari buruknya komunikasi, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan diantara anggota organisasi, dan kegagalan manajer untuk memberikan respon atas kebutuhan dan aspirasi dari para pekerja (Gitosudarmo & Sudita, 2000). Pandangan hubungan manusiawi menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang lumrah dan alami dalam setiap kelompok dan organisasi. Karena keberadaan konflik dalam organisasi tidak dapat dihindari, maka konflik tidak harus bersifat buruk, tetapi memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Sedang pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik tidak hanya dapat menjadi kekuatan positif di dalam kelompok, tetapi justru mutlak perlu bagi kelompok agar dapat menghasilkan semangat dan kreativitas (Muhyadi, 1989; Nimran, 1999).

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut setiap pimpinan dapat melihat bagaimana dirinya menyoroiti konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan perusahaan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah konflik itu wajar dan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi, perlu diambil nilai positifnya

karena adanya konflik berarti menandakan adanya dinamika dalam organisasi tersebut. Karena itu konflik tidak perlu ditakuti, sebuah konflik dapat menimbulkan perubahan positif yang pada gilirannya dapat mendorong efektifnya organisasi.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di dua kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa kedua wilayah pemekaran ini dianggap dapat mewakili kelima kabupaten/kota pemekaran di Sumatera barat. Kedua Kabupaten/kota pemekaran tersebut adalah ibu kota Kabupaten Darmasraya (Sungai Dareh) dan ibu kota Kabupaten Pasaman Barat (Simpang Empat). Untuk memastikan bahwa perubahan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah pemekaran merupakan dampak dari migrasi akibat pemekaran wilayah, maka di pilih satu kontrol untuk masing-masing wilayah yaitu salah satu nagari terdekat yang tidak mengalami migrasi.

### **3.2. Metode**

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan menggunakan tiga metode penelitian, sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni kajian data sekunder, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in-depth interview), lihat matriks data set dalam tabel 1. Berikut diuraikan masing-masing metode penelitian tersebut.

#### **3.2.1. Kajian Data Sekunder**

Sebagaimana terlihat dalam tabel 1, bahwa kajian data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mencapai tujuan pertama, kedua dan ketiga penelitian. Data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan-tujuan ini akan dikumpulkan dari BPS kabupaten pemekaran (Kabupaten dalam angka dan Kecamatan dalam angka) dan juga instansi terkait. Adapun data-data yang dibutuhkan meliputi jumlah penduduk sebelum pemekaran dan jumlah penduduk setelah pemekaran (data penduduk tahun 2010), komposisi penduduk menurut etnik sebelum dan setelah pemekaran dan komposisi penduduk negeri asal sebelum dan setelah pemekaran. Untuk melihat dampak ekonomi dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk terhadap masyarakat asli daerah pemekaran, maka data yang

dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat sebelum dan setelah pemekaran seperti kepemilikan usaha, jenis pekerjaan masyarakat, penjualan tanah/bangunan dan tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan untuk melihat dampak sosial, dibutuhkan data yang berhubungan dengan kondisi sosial wilayah pemekaran sebelum dan setelah pemekaran seperti adanya konflik antar etnis, kenakalan remaja, tingkat kriminalitas, prostitusi dan penggunaan obat-obatan terlarang.

### **3.2.2. Focus Group Discussion**

Focus Group Discussion dilakukan untuk meneliti permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah pemekaran serta mencoba untuk mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk menekan dampak negatif dan mendorong dampak positifnya. FGD akan dilakukan di ibukota kabupaten, kecamatan dan nagari, dan partisipannya terdiri dari wali nagari, camat, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh wanita.

### **3.2.3. Wawancara Mendalam (in-depth interview)**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi guna mencapai tujuan penelitian kedua dan ketiga, sebagaimana terlihat dalam tabel 1. Sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, akan dikembangkan panduan wawancara untuk masing-masing narasumber.

### **3.2.4. Analisa Data**

Sebagaimana di rangkum dalam tabel 1, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa data pada tujuan pertama dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang terjadi perubahan jumlah dan komposisi penduduk setelah terjadinya pemekaran wilayah atau tidak. Data-data yang telah didapatkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Sementara untuk tujuan kedua sampai keempat, analisa data diarahkan pada upaya menganalisa dampak sosial dan ekonomi dari migrasi yang disebabkan oleh pemekaran wilayah serta mengidentifikasi solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang terjadi di daerah

pemekaran. Data yang ada kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu untuk memastikan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah pemekaran merupakan dampak migrasi, maka dilakukan komparasi antara kondisi sosial ekonomi daerah pemekaran dan nagari kontrol yang tidak mengalami migrasi.

Tabel 1. Matriks data set Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Metode pengumpulan data	Analisa Data
1	Mengetahui perubahan jumlah dan komposisi penduduk di ibu kota kabupaten pemekaran baru	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk sebelum pemekaran kabupaten Jumlah penduduk setelah pemekaran (tahun 2010 keatas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPS Kabupaten (Kabupaten dalam Angka, Kecamatan dalam Angka)</li> <li>Focus Group Discussion (FGD)</li> </ul>	Duplikasi dokumen data sekunder	Deskriptif kualitatif (Bandingkan dengan nagari kontrol)
	Komposisi penduduk menurut etnik	Komposisi penduduk menurut etnik sebelum pemekaran kabupaten Komposisi penduduk menurut etnik setelah pemekaran (tahun 2010 keatas)				
	Komposisi penduduk negeri asal menurut	Komposisi penduduk negeri asal sebelum pemekaran kabupaten Komposisi penduduk negeri asal setelah pemekaran (tahun 2010 keatas)				
2	Mengetahui dampak ekonomi dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk tersebut bagi pendatang dan masyarakat asli	Jenis usaha yang berkembang	Perkembangan usaha menurut jenis sebelum pemekaraan dan saat ini Kepemilikan usaha oleh pendatang dan penduduk asli sebelum pemekaran dan saat ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wali nagari</li> <li>Camat</li> <li>Tokoh masyarakat</li> <li>Pemuda</li> <li>Tokoh wanita</li> <li>Data Sekunder dari Instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Focus Group Discussion (FGD)</li> <li>Pengumpulan data Sekunder</li> <li>In-depth interview</li> </ul>	Deskriptif kualitatif (Bandingkan dengan nagari kontrol)
	Jenis lapangan kerja yang terbuka	Pekerjaan masyarakat pendatang dan asli menurut jenis sebelum pemekaraan dan saat ini				
	Kesenjangan pendapatan	Perkiraan perkembangan pendapatan pendatang dan penduduk asli sebelum pemekaran dan saat ini				
	Perpindahan asset	Tanah dan bangunan yang dijual oleh penduduk asli pada pendatang setelah pemekaran				
3	Mengetahui dampak sosial perubahan jumlah dan komposisi penduduk tersebut ditengah masyarakat	Kecemburuan sosial Konflik antar etnik Kriminalitas Prostitusi Pengunaan Napza Kenakalan remaja		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wali nagari</li> <li>Camat</li> <li>Tokoh masyarakat</li> <li>Pemuda</li> <li>Tokoh wanita</li> <li>Data Sekunder dari Instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Focus Group Discussion (FGD)</li> <li>Pengumpulan data Sekunder</li> <li>In-depth interview</li> </ul>	Deskriptif kualitatif (Bandingkan dengan nagari kontrol)

4	Secara partisipatif, mengidentifikasi solusi atas dampak negatif dan meningkatkan dampak positif baik ekonomi dan sosial			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wali nagari</li> <li>• Camat</li> <li>• Tokoh masyarakat</li> <li>• Pemuda</li> <li>• Tokoh wanita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Focus Group Discussion (FGD)</li> </ul>	Deskriptif kualitatif
---	--	--	--	--	--	-----------------------

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Perkembangan Pembangunan dan Pendudukan Ibu Kota Kabupaten Pemekaran**

#### **4.1.1. Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Solok Selatan**

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran di Sumatera Barat. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 yang memiliki luas wilayah 3.346,20 km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan berada di Padang Aro yang berjarak lebih kurang 161 km dari ibu kota Sumatera Barat. Padang Aro adalah salah satu jorong di dalam Nagari Lubuk Gadang. Kabupaten Solok Selatan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Wilayahnya pada masa itu meliputi Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Selanjutnya pada tahun 2007 kecamatan Sangir Jujuan dimekarkan menjadi Kecamatan Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo. Sementara itu Kecamatan Sungai Pagu dimekarkan pula menjadi Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Pauh Duo. Hingga akhir tahun 2011, jumlah kecamatan Kabupaten Solok Selatan tidak mengalami perubahan seperti halnya pada akhir tahun 2007, yaitu masih 7 kecamatan. Namun pada tingkat nagari dan jorong masih terjadi pemekaran daerah.

Secara geografis Kabupaten Solok Selatan terletak pada ketinggian 350-430 meter di atas permukaan laut. Dari total luas wilayah mencapai 3.346,20 km<sup>2</sup>, 58,07 persen wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya dan sisanya 41,93 persen merupakan kawasan hutan lindung. Kabupaten ini berada pada kawasan dataran tinggi, dimana 69 persen wilayahnya memiliki kemiringan mencapai 40 derajat yang berarti cukup rawan bencana dan hanya 15 persen wilayah kabupaten ini yang tergolong datar.

Dari potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Solok Selatan, peta geologi memperlihatkan wilayah ini memiliki potensi sumber daya mineral berupa tembaga, emas dan perak. Sedangkan jika dilihat dari kondisi tanahnya yang terdiri dari tanah andosol dan litosol, Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi yang bagus dalam pengembangan kegiatan pertanian terutama tanaman

hortikultura dan perkebunan.

Ibu kota Kabupaten Solok Selatan adalah Padang Aro, yakni sebuah Jorong di Nagari Lubuk Gadang, kecamatan Sangir. Wilayah Nagari Lubuk Gadang pada awalnya merupakan satu kecamatan yakni kecamatan Sangir. Seiring dengan berdirinya kabupaten Solok Selatan, pemerintah kabupaten memekarkan kecamatan sangir menjadi beberapa kecamatan, maka nagari Lubuk Gadang pada tahun 2007 dimekarkan menjadi tiga nagari, yakni nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadag Selatan, Nagari Lubuk Gadang Timur dan Nagari Lubuk Gadang Utara.

Luas Nagari Lubuk Gadang saat ini adalah 362,33 km<sup>2</sup>. Secara administratif Lubuk Gadang terbagi menjadi 14 jorong. Wilayah nagari Lubuk Gadang dilalui jalan utama yang menghubungkan wilayah-wilayah penting, seperti jalan menuju Kabupaten Kerinci, Jambi dari Padang, dan juga persimpangan menuju Sungai Kunit, ke arah kabupaten Dharmasraya. Sehingga nagari Lubuk Gadang menjadi perlintasan lalu lintas dan ramai dilewati masyarakat. Selain mudah di jangkau oleh nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan, ke depan nagari ini direncanakan menjadi kota satelit yang menghubungkan tiga daerah yang berdampingan yaitu Sungai Penuh Propinsi Jambi yang hanya berjarak 30 km, Kabupaten Dharmasraya yang berjarak 90 km dan Kabupaten Solok yang berjarak 60 km.

Dengan pertimbangan kemudahan akses dan pesatnya perkembangan ekonomi, maka beralasan pusat pemerintahan kabupaten Solok Selatan di tempatkan di nagari Lubuk Gadang, tepatnya di nagari Padang Aro.

Nagari Lubuk Gadang didominasi oleh kawasan pegunungan. Gunung tertinggi di Sumatera dan tertinggi nomor dua di Indonesia sebagian terletak di Nagari Lubuk Gadang yaitu Gunung Kerinci (3.805 m). Pada bagian Selatan Nagari Lubuk Gadang terdapat jajaran Bukit Barisan dimana lereng bukit barisan ini merupakan daerah subur yang luas sehingga cocok ditamanami dengan perkebunan.

Pada bagian Barat Nagari Lubuk Gadang kaya akan hasil tambang seperti timah, emas dan logam lainnya yang menurut rencana akan di eksplorasi oleh PT. MMC. Dari kaki Gunung Kerinci mengalir dua sungai besar yaitu Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki yang mengalir sampai ke Sungai Batang Hari Propinsi

Jambi.

#### 4.1.2. Perubahan jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang

Setelah ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang berkembang pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, pemerintahan dan perekonomian masyarakat. Selama sepuluh tahun terakhir jalan yang melewati Padang Aro, dilakukan pelebaran yang signifikan, sehingga lalu lintas kendaraan menjadi lebih lancar. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampung peningkatan jumlah dan frekwensi kendaraan yang melewati jalan utama di nagari Lubuk Gadang ini. Sebagai pusat pemerintahan, pembangunan fisik juga terlihat dari berdirinya bangunan pemerintahan, seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Seiring dengan itu, perkembangan pesat juga terlihat dari pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Sarana perekonomian, seperti pasar Padang Aro juga mengalami perbaikan, walau sudah ada rencana untuk memindahkan pusat pasar ke lokasi lain, karena pasar Padang Aro sudah tidak sanggup lagi menampung semakin ramainya pedagang dan pengunjung pasar, terutama pada hari pasar.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Gadang dan Lubuk Malako, Solok Selatan

No	Jenis Kelamin	Nagari Lubuk Gadang			Nagari Lubuk Malako		
		Tahun 2004	Tahun 2012*	Pertumbuhan (%/thn)	Tahun 2004	Tahun 2013**	Pertumbuhan (%/thn)
1	Laki-Laki	17,920	19,841	1.34	4,163	4,261	0.26
2	Perempuan	19,075	19,339	0.17	4,052	4,214	0.44
	<b>Jumlah</b>	<b>36,995</b>	<b>39,180</b>	<b>0.74</b>	<b>8,215</b>	<b>8,475</b>	<b>0.35</b>
	<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	<b>58.44</b>	<b>61.90</b>		<b>48.40</b>	<b>49.94</b>	

Sumber: 1) Kecamatan Sangir Dalam Angka 2005 dan 2013

2) Kecamatan Sangir Dalam Angka 2005 dan Kecamatan Sangir Jujuan Dalam Angka 2014

**Keterangan:** \*) Data gabungan empat nagari (Nagari Lubuk Gadang, Lubuk Gadang Selatan, Lubuk Gadang Timur dan Lubuk Gadang Utara) yang merupakan pemekaran dari nagari Lubuk Gadang semula

\*\*\*) Data gabungan empat nagari (Nagari Lubuk Malako, Padang Air Dingin, dan Padang Ganting) yang merupakan pemekaran dari nagari Lubuk Malako semula

Perkembangan pembangunan fisik dan pemerintahan ini mengundang kehadiran orang dari luar untuk datang dan menetap di Nagari Lubuk Gadang, terutama setelah pemekaran kabupaten Solok Selatan. Sebagaimana terlihat dalam tabel 2, bahwa nagari Lubuk Gadang mengalami pertumbuhan rata-rata 0.74% per tahunnya. Pertumbuhan ini lebih cepat dibanding dengan nagari tetangganya Lubuk Malako, yang bukan lokasi pusat pemerintahan. Terlihat juga bahwa laju

pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan. Ini kuat sekali mengindikasikan bahwa penambahan jumlah penduduk di nagari Lubuk Gadan ini disebabkan oleh migrasi masuk, terutama laki-laki.

Dari hasil FGD yang dilakukan dengan pemuka masyarakat, diketahui bahwa Penduduk Asli di Padang Aro juga merasakan bahwa sejak terbentuknya kabupaten Solok Selatan, jumlah pendatang meningkat. Sementara dari hasil wawancara dengan pemuka masyarakat di Nagari Lubuk Malako, masyarakat belum merasakan banyak kehadiran pendatang.

Asal pendatang, setelah pemekaran, di Padang Aro adalah bervariasi. Namun secara umum diketahui oleh masyarakat bahwa pendatang tersebut berasal dari sebagian besar nagari lain di Solok Selatan, dari Kerinci, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan dari pulau Jawa.

Secara demografis, penduduk Kabupaten Solok Selatan sebagian besar adalah etnis Minangkabau. Disamping penduduk asli Minangkabau, Kabupaten Solok Selatan juga memiliki penduduk dengan etnis lain yaitu etnis Jawa. Etnis Jawa awalnya datang ke daerah ini sebagai transmigran. Selain sebagai transmigran, mereka juga datang sebagai pendatang atau pun pekerja.

#### ***4.1.3. Nagari Lingkungan Aur Pasaman Barat***

Kabupaten Pasaman Barat bersama-sama dengan Kabupaten Solok Selatan, dan Dharmasraya adalah kabupaten pemekaran pada tahun 2004 di Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang No. 38 tanggal 18 Desember Tahun 2003. Secara geografis Pasaman Barat terletak antara koordinat  $00^{\circ}33''$  LU sampai dengan  $00^{\circ}11''$  LS dan  $99^{\circ}10''$  BT sampai dengan  $100^{\circ}04''$  BT. Luas wilayah  $3.887,77$  Km<sup>2</sup>, sedangkan luas laut sesuai dengan batas administrasi laut seluas 4 Mil dari darat yaitu seluas  $1126,016$  Km<sup>2</sup> (ZEE kabupaten) dan pada batas administrasi laut provinsi seluas 12 Mil dari darat yaitu seluas  $3378,048$  Km<sup>2</sup> (ZEE provinsi yang juga dimanfaatkan Kabupaten untuk usaha ekonomi). Laporan BPS Pasaman Barat memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk selama periode 5 tahun sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 rata-rata sebesar 1.6% pertahun.

Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat adalah Simpang Empat, yakni salah satu

jorong dalam nagari Lingkung Aur, kecamatan Pasaman. Nagari Lingkung Aur secara administratif terbagi kedalam 11 jorong. Dengan luas mencapai 168 km<sup>2</sup> dan penduduk pada tahun 2013 sebanyak 32,846 jiwa, maka nagari Lingkung Aur merupakan nagari terpadat di Pasaman Barat, dengan kepadatan mencapai 195.1 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pilihan menjadikan Simpanga Empat sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat adalah tepat mengingat posisi strategis baik dari sisi letaknya secara geografis maupun dari sisi pusat kegiatan perekonomian masyarakat. Dari sisi geografis, Simpang Empat terletak di lintasan Barat Sumatera, yang menghubungkan Padang dengan Madina, Sumatera Utara. Terdapat jalan utama yang melintasi nagari ini yang terdapat persimpangan yang menuju Nagari Sasak ke arah Barat, menuju Talu dan Panti ke arah Timur, menuju Ujung Gading dan Air Bangis ke arah Utara dan menuju Padang ke arah Selatan. Karena kemudahan akses transportasi ini membuat kegiatan perekonomian masyarakat di nagari-nagari sekitarnya berpusat di Pasar Simpang Empat ini.

Nagari Lingkung Aur ini memiliki tanah yang subur dengan kemiringan yang rendah. Berada pada ketinggian 80 – 2,913 m diatas permukaan laut. Sehingga pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit berkembang pesat, terutama sejak tahun 1980-an, setelah proyek ADP.

#### ***4.1.4. Perubahan jumlah penduduk Nagari Lingkung Aur***

Nagari Lingkung Aur juga berkembang pesat setelah ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten Pasaman Barat. Perkembangan tersebut terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, pemerintahan dan perekonomian masyarakat. Selama sepuluh tahun terakhir jalan yang melewati Simpang Empat, dilakukan pelebaran yang signifikan, sehingga lalu lintas kendaraan menjadi lebih lancar, sebagai bentuk antisipasi peningkatan jumlah dan frekwensi kendaraan yang melewati jalan utama di nagari ini. Sebagai pusat pemerintahan, pembangunan fisik juga terlihat dari berdirinya bangunan pemerintahan, seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Sarana kesehatan dan pendidikan juga berkembang pesat. Sarana perekonomian, seperti pasar Simpang Empat juga mengalami perbaikan.

Konsekwensi dari kemajuan pembangunan fisik dan perekonomian tersebut adalah mengundang datangnya pencari kerja dan pelaku usaha. Akibatnya penduduk Simpang Empat, khususnya, dan nagari Lingkung Aur umumnya mengalami perkembangan yang amat pesat. Sebagaimana terlihat dalam tabel 3, bahwa penduduk nagari Lingkuang Aur selama tujuh tahun terakhir, 2003-2010 mengalami perkembangan yang amat cepat. Laju pertumbuhan penduduknya adalah 3.26% per tahunnya. Laju pertumbuhan ini jauh lebih cepat dibanding dengan nagari tetangganya yang hanya 1.30% per tahun. Cepatnya pertumbuhan penduduk nagari Lingkung Aur ini dapat dipastikan disebabkan oleh migrasi masuk.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Nagari Lingkung Aur dan Aur Kuning, Pasaman Barat.

No	Jenis Kelamin	Nagari Lingkuang Aua			Nagari Aua Kuning		
		Tahun 2003	Tahun 2010	Pertumbuhan (%/thn)	Tahun 2003	Tahun 2010	Pertumbuhan (%/thn)
1	Laki-Laki	12,606	16,720	3.26	8,289	9,341	1.27
2	Perempuan	12,122	16,126	3.30	8,111	9,194	1.34
	<b>Jumlah</b>	<b>24,728</b>	<b>32,846</b>	<b>3.28</b>	<b>16,400</b>	<b>18,535</b>	<b>1.30</b>
	<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	<b>147.19</b>	<b>195.51</b>		<b>96.47</b>	<b>109.03</b>	

Sumber: Kecamatan Pasaman Dalam Angka Tahun 2004 dan Tahun 2011

Dari hasil FGD dengan tokoh masyarakat nagari Lingkung Aur, diketahui bahwa penduduk asli merasakan bahwa sejak terbentuknya kabupaten Pasaman Barat, jumlah pendatang meningkat, walau tidak dilakukan pendataan dengan akurat. Hasil wawancara dengan wali nagari dan tokoh masyarakat di nagari Aur Kuning didapatkan bahwa di Nagari Aur Kuning belum dirasakan banyak kehadiran pendatang. Dengan demikian, dapat diduga kuat bahwa kehadiran pendatang ke Nagari Lingkung Aur dikarenakan daya tarik pesatnya perkembangan perekonomian sebagai akibat dari pembangunan di ibu kota kabupaten yang baru dimekarkan.

Dari FGD diketahui bahwa asal pendatang yang sekarang bermukim dan bekerja di Simpang Empat sebagian besar berasal dari Tanah Datar (Batusangkar), Bukittinggi (Agam), Pariaman (Padang Pariaman), Jawa dan sebagian kecil dari Nias. Dengan demikian, setelah pemekaran kabupaten Pasaman Barat, komposisi masyarakat di Nagari Lingkung Air menjadi semakin heterogen. Orang jawa yang datang banyak yang mendekat/menyatu ke ninik mamak menjadi cucu kemenakan,

berbeda dengan suku lainnya.

## **4.2. Dampak ekonomi dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk**

### **4.2.1. Perubahan ekonomi di Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan**

Pemekaran wilayah merupakan sebuah upaya dalam mempercepat pembangunan serta peningkatan kualitas dan kemudahan dalam pemberian pelayanan pada masyarakat. Selain itu, pemekaran wilayah pada hakekatnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemekaran daerah diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemekaran memungkinkan sumberdaya mengalir ke daerah yang masih belum terlalu berkembang, sehingga pembangunan juga akan dialami oleh wilayah yang sebelumnya tidak terlalu tersentuh. Dengan adanya pembangunan yang pesat dan terbukanya lapangan kerja baru di daerah pemekaran akan mengundang migrasi masuk ke wilayah tersebut. Kedatangan para migran sebagai dampak pemekaran wilayah, dipastikan akan memberikan dampak (positif dan negatif) pada perekonomian wilayah pemekaran tersebut.

Dari diskusi yang dilakukan dengan pemuka masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh pemuda yang ada di nagari Lubuak Gadang yang merupakan pusat Kabupaten Solok Selatan diketahui bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi perekonomian wilayah tersebut.

Selain penduduk asli (etnis Minangkabau) yang sejak awal sudah berdomisili di wilayah tersebut, Solok Selatan juga memiliki penduduk etnis lain yaitu etnis Jawa dan pendatang dari Kerinci. Semenjak pemekaran pada kahir tahun 2003 semakin banyak pendatang yang berpindah kewilayah tersebut yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai bank, pedagang dan pengusaha yang membuka usaha diwilayah tersebut.

Beberapa usaha yang muncul setelah adanya pemekaran diwilayah tersebut diantaranya adalah:

- a. **Toko / kios Saprodi pertanian.** Sebelum dimekarkan, petani di wilayah ini kadang –kadang harus pergi ke wilayah lain seperti Kota Solok atau Padang untuk mendapatkan saprodi pertanian, karena jumlah kios saprodi yang terbatas.

Akan tetapi setelah dimekarkan mulai banyak bermunculan kios/toko saprodi pertanian diwilayah tersebut, sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak untuk keperluan input petanian mereka

- b. Depot air minum
- c. Counter pulsa
- d. Toko-toko bangunan
- e. Kos-kosan untuk pendatang
- f. Toko Elektronik dan perabotan
- g. Dealer kendaraan bermotor
- h. Kantor cabang beberapa Bank
- i. Kafe dan rumah makan

Dengan bermunculannya berbagai bentuk usaha kegiatan ekonomi, secara otomatis telah membuka lapangan kerja bagi para pemuda di daerah ini. Dari hasil diskusi diketahui bahwa hal ini berdampak positif dalam mengurangi pengangguran khususnya bagi para pemuda di daerah ini.

Selain itu dari hasil diskusi diketahui bahwa sebagian besar mereka yang membuka usaha di wilayah ini adalah penduduk pendatang yang pada umumnya masih berasal dari wilayah Sumatera Barat. Karena kecendrungan yang terjadi adalah penduduk asli menjual asset mereka (tanah) yang berada di tempat-tempat strategis seperti pinggir jalan raya dan pusat keramaian ke penduduk pendatang, kemudian mereka berpindah ke daerah pinggiran. Sehingga pekerjaan yang saat ini digeluti oleh sebagian besar penduduk asli adalah bertani. Disamping itu penduduk asli yang telah lebih lama berdomisili di daerah ini merasa bahwa kesempatan mereka untuk membuka usaha dan mendapatkan modal lebih kecil dibandingkan para pendatang yang memang telah berpengalaman dalam berusaha. Mereka merasa, bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang lebih baik dari para pendatang dalam membuka usaha, hal ini lah yang membuat sebagian besar penduduk asli lebih memilih untuk menjual asset mereka pada para pendatang. Sehingga secara ekonomi pendatang lebih sejahtera dari penduduk yang telah lebih dahulu tinggal di wilayah ini. Akan tetapi hal ini malah menjadi pendorong bagi penduduk asli untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Setelah adanya pemekaran, banyak penduduk asli yang telah menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi.

#### **4.2.2. Perubahan ekonomi di Nagari Lingkung Aur, Pasaman Barat**

Walau secara detail belum tersedia data perkembangan ekonomi masyarakat di nagari Lingkung Aur sebelum dan setelah pemekaran kabupaten Pasaman Barat, namun dari FGD dan wawancara yang dilakukan didapatkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir terjadi perkembangan ekonomi yang pesat. Simpang Empat berkembang sedemikian rupa menjadi pusat perekonomian masyarakat. Secara perlahan diakui oleh masyarakat bahwa terjadi perubahan usaha perekonomian di nagari Lingkung Aur selama sepuluh tahun terakhir. Ruko-ruko semakin banyak dan diikuti dengan semakin banyak yang bekerja sebagai pedagang dan bekerja pada usaha perdagangan. Sungguhpun demikian, jumlah mereka yang bekerja sebagai petani juga semakin banyak, seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Para pendatang (migran) sebagian besara adalah pedagang dan pekerja perkebunan, PNS dan penyedia jasa. Pendatang sebagian besar berdagang pakaian, emas, elektronik dan kendaraan. Mereka pada awalnya menyewa rumah atau tanah penduduk asli untuk tempat berdagang. Kemudian banyak diantara mereka yang membeli tanah dan membangun bangunan rumak toko (ruko) di pusat-pusat perekonomian. Hal ini juga dimungkinkan karena masyarakat asli menjual tanah, yang hasil penjualan tanah menjadi modal pula untuk berusaha. Selain itu, kehadiran pendatang yang membuka usaha menguntungkan bagi penduduk asli karena tersedia kesempatan kerja dan meningkatnya permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat asli. Dengan demikian, terjadi hubungan saling membutuhkan antara pendatang dan penduduk asli. Terbukanya kesempatan kerja ini, diakui oleh masyarakat selama FGD, menyebabkan pengangguran terasa lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran sebelum pemekaran.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendatang yang berdagang sebagian besar menyewa dan memiliki lokasi strategis dari sisi ekonomi. Di kawasan yang dekat dengan pusat perekonomian, seperti di sekitar pasar Simpang Empat, berdiri ruko-ruko dan bangunan lainnya yang dibangun baik oleh masyarakat asli, pendatang maupun kerjasama antara masyarakat asli dan pendatang. Tempat-tempat tersebut sebagian besar disewakan dan dijual, dan sebagian besar oleh pendatang. Walau dari FGD dengan tokoh masyarakat, belum terasa ada kesenjangan ekonomi yang tajam antara pendatang dan penduduk asli. Namun untuk jangka panjang dikhawatirkan pendatang akan mendapatkan manfaat

kemajuan ekonomi yang lebih besar dibanding penduduk asli, karena asset ekonomi seperti ruko-ruko ditempat strategis tersebut berada di tangan para pendatang. Masyarakat asli mengakui bahwa kemampuan berdagang mereka kalah dibanding dengan kemampuan berdagang pendatang. Selain itu, bidang pekerjaan dan penyediaan jasa yang memerlukan pendidikan dan skill yang tinggi, seperti karyawan perbankan, konsultan, notaris, pengacara, sebagian besar dikerjakan oleh pendatang.

Kesenjangan jangka panjang ini seperti dapat diperlambat saat mana kebijakan pemerintah kabupaten yang memprioritas penduduk asli dalam penerimaan CPNS dan mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang masih dapat dikerjakan oleh perusahaan yang dikelola oleh masyarakat asli.

#### **4.3. Dampak Sosial dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk**

##### **4.3.1. Dampak Sosial di Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan**

Pembangunan wilayah pemekaran akan mengundang migrasi ke daerah tersebut. Hal ini akan menciptakan interaksi sosial antara pendatang dan penduduk asli yang berdampak positif maupun negative. Hal ini juga terjadi di daerah Lubuk Gadang yang merupakan pusat Kabupaten Solok Selatan. Hal positif yang terjadi antara lain adalah:

- a. **Munculnya kesadaran akan nilai positif pendidikan.** Setelah adanya pemekaran, banyak penduduk asli yang telah menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi. Hal ini juga didorong oleh karena mereka melihat para pendatang yang lebih berhasil dan sejahtera dari mereka.
- b. **Berkurangnya premanisasi.** Dengan terbukanya banyak lapangan kerja diderah ini telah menyerap banyak pemuda sebagai tenaga kerjanya. Tidak banyak lagi pemuda yang menganggur dan melakukan kegiatan-kegiatan preman seperti pemalakan dan perkelahian.

Akan tetapi pembangunan dan kemunculan para pendatang ini juga menimbulkan dampak negative dalam kehidupan sosial masyarakat di daerah ini, diantaranya adalah:

- a. Meskipun belum sampai pada konflik, tapi kondisi pendatang yang lebih sejahtera dari penduduk asli sedikit banyaknya menimbulkan kecemburuan.

- b. Adanya kecendrungan penduduk pendatang yang tidak terlalu membaaur dengan penduduk asli. Penduduk asli merasa bahwa para pendatang yang sebagian besar bekerja sebagai pegawai (PNS dan bank), pedagang dan pengusaha hanya menjadikan daerah tersebut sebagai tempat usaha saja sehingga mereka kurang membaaur dengan penduduk asli. Dua kondisi diatas berpotensi untuk melahirkan konflik social didaerah tersebut.
- c. Penggunaan narkoba dikalangan remaja dan pemuda.
- d. Kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Bermunculannya warnet dan mudahnya mengakses internet telah membuat para remaja mudah mengakses hal-hal negative. Hal ini berpengaruh terhadap pola perilaku mereka.
- e. Prostitusi. Adanya usaha kafe dan karaoke didaerah ini mendorong mulai munculnya prostitusi didaerah ini. Menurut diskusi diketahui bahwa para pekerja prostitusi ini adalah pendatang yang tertarik karena daerah ini mulai berkembang.
- f. Mulai hilangnya peran ninik mamak.
- g. Mulai munculnya masalah sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, masalah sampah mulai muncul di daerah ini.

#### **4.3.2. Dampak sosial di Nagari Lingkung Aur, Pasaman Barat**

Dari hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat didapatkan informasi bahwa kehadiran pendatang dari luar daerah baik yang berbeda suku maupun berbeda agama dengan penduduk asli, sejauh ini belum memunculkan masalah sosial. Perkembangan pembangunan ekonomi, modernisasi, kehadiran pendatang memberikan dampak sosial yang lebih kompleks di nagari Lingkung Aur. Beberapa permasalahan sosial muncul dan semakin marak selama sepuluh tahun terakhir, walau tidak dapat sepenuhnya disebabkan karena kehadiran pendatang. Permasalahan sosial yang mengemuka sewaktu FGD dan wawancara dengan masyarakat adalah meingkatnya penggunaan narkoba, ada indikasi kuat terjadi praktek prostitusi, serta konflik antara penduduk asli dan pendatang. Sungguhpun demikian, perkembangan pembangunan ekonomi dan kehadiran pendatang ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Secara sosial dampak positif tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kriminalitas, sebagai konsekwensi dari berkurangnya pengangguran.

Menurut masyarakat, indikasi kuat meningkatnya penggunaan narkoba adalah terlihat dari banyaknya kasus narkoba yang ditemukan di Pasaman Barat khususnya dalam nagari Lingkung Aur. Banyak pemuda penduduk asli yang menggunakan narkoba, bila dibandingkan dengan pemuda pendatang secara absolut. Pemuda dan remaja memiliki rasa ingin tahun dan dipengaruhi pula pergaulan, merupakan faktor utama penyebab banyak pemuda yang terjerat sebagai pengguna narkoba. Sebagian besar diantara pengguna narkoba adalah pemuda pengangguran yang putus sekolah. Selain itu, letak nagari Lingkung Aur yang merupakan persimpangan dan dekat dengan perbatasan Sumatera Utara menyebabkan perdagangan narkoba mudah dilakukan dan sulit dideteksi oleh aparat keamanan.

Indikasi praktek prostitusi terlihat dari ada beberapa cafe tempat karaoke yang buka hingga dini hari. Cafe-cafe ini muncul hanya beberapa tahun terakhir. Sebelumnya cafe-cafe sedemikian sangat tabu untuk dibuka di nagari Lingkung Aur. Cafe-cafe ini mempekerja wanita muda dari luar daerah, terutama dari pulau Jawa. Cafe-cafe ini juga menawarkan minuman keras bagi pelanggannya. Ironisnya, menurut pengurus karang taruna, cafe-cafe ini didirikan dan dikelola oleh penduduk asli, bukan pendatang. Sehingga ada kesulitan pemuda untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemilik dan pengelolanya.

Konflik antara penduduk asli dengan pendatang juga merupakan permasalahan sosial yang muncul beberapa tahun terakhir. Walau muncul menjadi konflik terbuka, konflik ini disinyalir muncul karena rendahnya pengakuan pendatang terhadap datuak, ninik mamak dan pemerintahan nagari Lingkung Aur. Pendatang dari suku non Jawa dinyatakan belum ada yang mendekat ke ninik mamak, sebagaimana dilakukan oleh suku Jawa. Pendatang juga tidak melaporkan kehadirannya secara resmi ke pemerintahan nagari, sehingga mereka tidak terdata dengan baik dalam administrasi pemerintahan nagari. Pendatang sebagian besar tidak banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan bersama dengan penduduk asli. Kondisi ini menyebabkan ada “ketersinggungan sosial” penduduk asli dengan beberapa pendatang.

Walaupun permasalahan sosial sebagaimana diuraikan diatas sudah muncul sebelum Pasaman Barat menjadi kabupaten baru yang dimekarkan dari kabupaten induk Pasaman. Namun permasalahan sosial tersebut semakin besar dan eskalasinya

meningkat tajam sejak sepuluh tahun terakhir, setelah pemekaran. Walau tidak pula dapat dipersalahkan persoalan ini pada pemekaran dan kehadiran pendatang yang semakin besar, namun permasalahan sosial ini akan semakin besar dikemudian hari bila tidak dilakukan pengelolaan secara baik sejak dini.

Perkembangan perekonomian yang positif diduga oleh peserta FGD sebagai penyebab utama berkurangnya kriminalitas di nagari Lingkung Aur. Pencurian, penodongan dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya ditengah masyarakat dirasakan semakin berkurang selama sepuluh tahun terakhir. Penggangguran yang dirasakan semakin berkurang adalah alasan berkurangnya tindak kriminalitas tersebut.

Dalam diskusi dengan masyarakat, dilaporkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan beberapa kebijakan untuk mengendalikan dampak sosial negatif tersebut. Pemerintah kabupaten memberikan intervensi dengan memberikan Surat Keputusan (SK) kepala jorong, agar kepala jorong dapat langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah kabupaten bila terjadi persoalan sosial di wilayahnya. Selain itu, Bupati kepala daerah juga memfasilitasi penunjukkan dan membiayai Dai disetiap jorong, agar kegiatan keagamaan di tingkat jorong dengan melibatkan pemuda dapat berjalan lancar.

#### **4.4. Solusi Partisipatif atas permasalahan yang dihadapi**

##### **4.4.1. Solusi Partisipatif dari Nagari Lubuk Gadang, Solok Selatan**

1. Tantangan kedepan :
  - a. Diharapkan peningkatan pendidikan untuk generasi yang akan datang (investasi pendidikan).
  - b. Banyak terdapat perusahaan asing, masyarakat hanya mendapat plasma. Harapan Ketika HGU habis tidak diperpanjang.
  - c. Sifat malas akibat kurangnya informasi. Seperti informasi lapangan kerja tidak sampai ke pemuda (karang taruna tidak kuat)
  - d. Pendatang kurang menanggapi kegiatan pemuda karena peraturan yang dibuat.
  - e. Kepemimpinan yang mengetahui seluk beluk kondisi pasaman barat yang bisa merangkul ninik mamak dan adat.

- f. Masalah kenakalan yang tua2 seperti PSK mempengaruhi rumah tangga akhirnya berpengaruh ke semua termasuk perekonomian.
2. Potensi konflik sosial:
- a. Pedagang yang datang berpotensi menciptakan konflik sosial. Caranya pendatang menumpang ke ninik mamak. Tapi masih ada yang tidak ikut, karena pada saat datang tidak melapor ke jorong.
  - b. Apakah masyarakat datang bisa dibuat aturan secara adat melapor dulu baru bisa beraktivitas?
    - Biasanya orang pendatang sudah memiliki saudara disini.
    - Bisa dicobakan dibuat Pernag. Masih banyak pendatang yang tidak melapor. Seperti leasing2. Dicurigai leasing membuat stempel nagari sendiri untuk bukti persetujuan.
    - Potensi konflik : akibat tidak melapor ke jorong, pendatang tidak mengenal kepala jorong, pendatang tidak memberikan bantuan dana pada kegiatan jorong dan pemuda.

#### **4.4.2. Solusi Partisipatif dari Nagari Lingkung Aur, Pasaman Barat**

Dengan melihat dampak negative yang muncul setelah adanya pemekaran ini solusi partisipatif yang diharapkan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul baik ekonomi maupun social adalah:

- a. Adanya pelatihan kewirausahaan sehingga penduduk asli memiliki keahlian yang lebih baik untuk kemudian dapat bersaing dengan mereka yang telah berhasil.
- b. Adanya bantuan modal atau kemudahan dalam mengakses modal serta pendampingan dan pelatihan usaha
- c. Adanya sinkronisasi antara adat dan aturan pemerintah
- d. Pengelolaan sampah yang dapat diolah sehingga menghasilkan jenis usaha baru
- e. Adanya Perda yang mengatur tentang aturan café-café yang ada di lokasi, agar tidak memicu timbulnya masalah social
- f. Ada peraturan yang bisa diterapkan untuk mengatur alat komunikasi yang digunakan oleh para siswa dalam mengatasi kenakalan remaja atau masalah-masalah social lainnya
- g. Ada peraturan yang mengatur permasalahan sosial yang dipadukan dengan kearifan lokal, contohnya rekomendasi perizinan menjual tanah oleh ninik mamak

- h. Perpaduan antara pemimpin nagari ninik mamak, cadiak pandai dan bundo kanduang dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat

#### **4.5. Pembahasan**

Pembangunan fisik nagari Lingkung Aur di Pasaman Barat dan nagari Lubuk Gadang di Solok Selatan, sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang baru dimekarkan merupakan dua kasus perkembangan ekonomi yang menarik pendatang untuk bermigrasi. Terbukti bahwa pada kedua nagari tersebut terjadi pertumbuhan penduduk yang pesat. Migrasi masuk adalah penyebab utama pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut. Pembangunan ekonomi yang pesat dan kehadiran pendatang memberikan dampak ekonomi dan sosial, baik positif maupun negatif.

Dewasa ini dampak ekonomi masih dinilai positif bagi sebagian besar penduduk asli atas kehadiran pendatang. Pendatang yang sebagian besar berdagang membangun hubungan ekonomi yang baik dengan penduduk asli. Terbukanya kesempatan kerja memberikan dampak baik bagi penurunan pengangguran dan penurunan kriminalitas. Pada sepuluh tahun pertama ini belum dirasakan oleh penduduk asli bahwa mereka dipinggirkan secara ekonomi dengan kehadiran pendatang, namun justru terbangun hubungan saling membutuhkan dalam membangun ekonomi. Interaksi positif secara ekonomi ini muncul karena penduduk asli pada kedua ibu kota kabupaten ini relatif memiliki kemampuan berdagang dan berusaha yang baik, sehingga dapat memanfaatkan peluang usaha dan kesempatan kerja yang terbuka.

Namun demikian, kecenderungan pemilikan asset penting, terutama lahan dan bangunan di pusat-pusat perekonomian mulai beralih ke tangan para pendatang, dikhawatirkan untuk jangka panjang terjadi kesenjangan pendapatan antara penduduk asli dan pendatang. Peralihan asset dan perbedaan kemampuan usaha antara pendatang dan penduduk asli memungkinkan dimasa depan penduduk pendatang mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar sementara penduduk asli tertinggal di belakang.

Dari sisi sosial perkembangan ekonomi yang cepat dan kehadiran pendatang memberikan banyak dampak sosial yang bersifat negatif yang dirasakan oleh

masyarakat, seperti prostitusi, narkoba dan kriminalitas, merupakan ancaman integrasi masyarakat di masa yang akan datang.

Institusi adat, ternyata belum kuat untuk menghadapi perubahan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau selama ini terdapat aturan yang menyatakan bahwa pendatang mesti “malakok” ke salah satu ninik mamak, jika kita datang dan menetap dalam satu nagari. Aturan yang demikian membuat pendatang mendapatkan perlindungan secara adat dan mendapatkan status sebagai bagian dari masyarakat di nagari yang baru ditempatinya. Sekaligus “malakok” ini menjadi instrumen administrasi bagi pemerintahan nagari, bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dan terdaftar di pemerintahan nagari. Namun, aturan “malakok” ini sudah lemah sehingga pendatang tidak lagi diketahui dengan tepat. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya konflik, dan persoalan sosial lainnya, sebagaimana ditemui pada kedua nagari kasus diatas.

## **BAB V. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembangunan di ibu kota Kabupaten Pemekaran ini telah mengundang kehadiran pendatang
2. Kehadiran pendatang memberikan dampak ekonomi yang sampai sekarang dinilai positif. Namun diprediksikan akan membuat kesenjangan dimasa yang akan datang
3. Dampak sosial amat terasa akan mengancam integrasi sosial dimasa depan
4. Solusi yang ditawarkan secara partisipatif dapat dikembangkan menjadi rencana aksi untuk menekan potensi dampak negatif tersebut dimasa depan

## **BAB VI. RENCANA AKSI YANG DAPAT DILAKUKAN SECEPATNYA**

### **6.1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda penduduk asli**

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda penduduk asli adalah salah satu solusi praktis yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi kesenjangan pendapatan antara penduduk asli dan pendatang. Pelatihan ini diperlukan agar pemuda penduduk asli memiliki wawasan usaha dan terampil dalam mengelola usahanya, sehingga dapat berdampingan dan membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan pengusaha pendatang. Peserta pelatihan dapat diseleksi dari pemuda-pemuda yang sudah memulai usaha kecil dan mikro. Selain itu, pemerintah daerah memfasilitasi pemuda tempatan tersebut untuk dapat mengakses pembiayaan usaha dan pasar atas barang dan jasa yang dihasilkan.

### **6.2. Penguatan adat untuk menekan dampak negatif secara sosial**

Revitalisasi adat Minangkabau pada semua nagari yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten baru sangat diperlukan. Peran Datuk dan Ninik Mamak dalam mengendalikan masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan adalah sangat diperlukan. Pemerintahan nagari semaksimal mungkin menggali dan menggunakan hukum adat yang sudah berlaku untuk mengendalikan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah pendatang yang pesat. Budaya “malakok” bagi pendatang dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan kriminalitas, prostitusi dengan narkoba. Untuk itu, hendak difasilitasi pemerintah nagari untuk membuat perna tentang “malakok” ini agar semua pendatang terdaftar dalam administrasi pemerintahan nagari dan secara adat mendapatkan perlindungan. Selain itu, dengan “malakok, pendatang akan menjadi bagian yang integral dengan penduduk asli, sehingga dapat melakukan kegiatan sosial dan keagamaan yang sama dengan penduduk asli. “Malakok” menyebabkan adalah solusi untuk tidak memunculkan jarak sosial antara pendatang, yang mungkin saja secara ekonomi lebih baik, dengan penduduk asli.

### **6.3. Pembangunan keluarga**

Pembangunan keluarga menjadi solusi yang mesti dilakukan pada tingkat keluarga guna menekan penggunaan narkoba dan berkembangnya prostitusi. BKKBN dan Badan/Kantor Keluarga Berencana dapat bekerjasama melakukan penyuluhan dan mengembangkan kegiatan pembangunan keluarga. Karena keluarga adalah benteng pertama dan paling kuat dalam menghadapi permasalahan sosial yang muncul dari pesatnya pembangunan ekonomi dan kehadiran pendatang pada ibu kota kabupaten pemekaran ini.

### **6.4. Penguatan administrasi kependudukan**

Administrasi kependudukan di tingkat jorong dan nagari mesti diperkuat. Sejalan dengan kegiatan penguatan hukum adat diatas, penguatan administrasi jorong dan nagari akan mencatat semua pendatang dengan baik. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persoalan sosial atas kehadiran pendatang. Administrasi e-KTP yang dikembangkan selama ini hanya sampai pada tingkat kecamatan. Pemerintahan di tingkat nagari dan Jorong tidak memiliki data kependudukan yang dihasilkan dari e-KTP tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan sistem administasi resgistrasi penduduk pada tingkat jorong dan nagari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ara Shera Reganatha. 2008. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Intern Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan –*
- BPS Pasaman Barat. 2014. *Kecamatan Pasaman Dalam Angka 2014*. BPS Pasaman Barat. Simpang Empat.
- BPS Pasaman. 2004. *Kecamatan Pasaman Dalam Angka 2004*. BPS Pasaman. Lubuk Sikaping.
- BPS Solok Selatan. 2011. *Kecamatan Sangir Dalam Angka 2010*. BPS Solok Selatan. Padang Aro.
- BPS Solok. 2004. *Kecamatan Sangir Dalam Angka 2004*. BPS Solok. Arosuka.
- Hoogvelt Ankie. 1995. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang (Penyadur Alimandan)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, K. 1980. *Teori Kepribadian*. Bandung: Alumni
- Lee, Everett. S. 1976. *Teori Migrasi*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Lauer, Robert. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan SU, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus. 1984. “Masalah Penduduk dan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Demografi Indonesia*, 11(22): 1-9.
- Owens, R.G. 1995. *Organization Behavior in Education (Fourth Edition)*. Boston: Allynand Bacin Inc.
- Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim penerjemah Yasogama, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ravenstein, 1985. *Teori Migrasi*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta
- Soelaiman, Munandar, M. 1996. *Dinamika Masyarakat Transisi. Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Pustaka Pelajar, Bandung.

# **LAMPIRAN**

# **FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

## **Dampak Perubahan Penduduk dan Demografi pada Perekonomian dan Sosial Masyarakat di Kota/ Kabupaten Pemekaran Sumatera Barat**

---

### **PENGANTAR**

Maksud FGD adalah untuk mendapatkan gambaran tentang dampak ekonomi dan sosial dari perubahan jumlah dan komposisi penduduk terhadap daerah pemekaran serta mencoba mengidentifikasi secara partisipatif solusi atas dampak negatif dan meningkatkan dampak positif baik ekonomi maupun sosial.

### **Tujuan FGD adalah untuk:**

1. Mengetahui dampak ekonomi perubahan jumlah dan komposisi penduduk tersebut bagi pendatang dan masyarakat asli
2. Mengetahui jenis usaha yang berkembang setelah terjadi pemekaran
3. Mengetahui adanya kesenjangan pendapatan antara pendatang dan penduduk asli
4. Mengetahui perpindahan aset (tanah dan bangunan)
5. Mengetahui dampak sosial perubahan jumlah dan komposisi penduduk tersebut ditengah masyarakat
6. Mengetahui fenomena-fenomena sosial yang muncul setelah adanya pemekaran
7. Mengidentifikasi solusi atas dampak negatif dan meningkatkan dampak positif baik ekonomi dan social

Untuk itu, FGD ini diarahkan melalui panduan diskusi, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

### **PERTANYAAN:**

#### **ASPEK EKONOMI**

1. Apakah ada penambahan variasi jenis usaha setelah adanya pemekaran
2. Apa saja jenis-jenis usaha baru yang muncul setelah adanya pemekaran
3. Apakah jenis usaha baru tersebut dimiliki oleh penduduk asli atau pendatang
4. Disektor apa saja penduduk asli banyak terlibat
5. Disektor apa saja pendatang banyak terlibat
6. Menurut pandangan Bapak/ibu mana yang lebih sejahtera kehidupan pendatang atau penduduk asli
7. Apakah penduduk asli banyak melakukan transaksi jual tanah/bangunan
8. Biasanya tanah/bangunan yang dijual tersebut berlokasi dimana

9. Sejauh ini siapa pembeli tanah/ bangunan tersebut
10. Dimana mayoritas penduduk asli tinggal saat ini (pusat kota atau pinggir kota)

### **ASPEK SOSIAL**

1. Menurut Bapak/ ibu apakah pendatang dan penduduk asli dapat berbaur dengan baik
2. Setelah pemekaran apakah pernah terjadi konflik antara pendatang dan penduduk asli. Seperti apa bentuk konflik tersebut
3. Seandainya ada konflik, apa yang menjadi pemicunya.
4. Dalam pandangan Bapak/ ibu apa saja masalah sosial yang muncul di daerah ini setelah pemekaran
5. Menurut Bapak/ibu permasalahan sosial apa yang paling krusial daerah ini
6. Menurut Bapak/Ibu kenapa masalah tersebut muncul
7. Menurut pandangan Bapak/ibu apakah masalah ini muncul karena pengaruh pendatang
8. Kalau terjadi konflik dan permasalahan sosial lain, tindakan seperti apa yang biasanya dilakukan.
9. Siapakah yang biasanya bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah tersebut
10. Apakah ada lembaga khusus yang menangani masalah-masalah sosial tersebut
11. Apa peran pemuda/klp wanita dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut
12. Apakah pemuda pendatang dapat bersosialisasi dengan penduduk asli dengan baik
13. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi/mengurangi masalah sosial tersebut

**DEMIKIAN, TERIMA KASIH**